



Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber

Jerry Indrawan^{1*}, Astin Julia Rosa¹, Anwar Ilmar¹, Garcia Krisnando Nathanael²

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

²Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Mar 03, 2021

Diterima: Jun 06, 2021

Dipublikasi: Jul 31, 2021

Kata Kunci:

Masyarakat;Partisipasi;
Politik;Siber;Teknologi;

Koresponden:

Jerry Indrawan

Jurusan Ilmu Politik,
Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Email:

jerry.indrawan@upnvj.ac.id

Sitasi Cantuman:

Indrawan, J., Rosa, A. J., Ilmar, A., & Nathanael, G., K. (2021). Partisipasi Politik Masyarakat di Era Politik Siber. *Journal of Political Issues*. 3(1); 1-12. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract In today's world, many technologies have emerged that can facilitate human life, one of which is the internet, which is in the realm of cyber. The development of technology in the internet today allows political activities to be carried out through this realm. Developments in the form of facilities for accessing information relating to political activities are currently mostly carried out through this cyber medium, so it is called cyber politics. Cyber politics relies heavily on digital platforms to disseminate political messages. Thus, in the midst of the current fast pace of information technology, it is hoped that the era of cyber politics can have a positive effect on people's political participation. Community political participation is indispensable in determining political leaders because their role is very high in the era of cyber politics. The results of the research show that public political participation in the cyber era has increased, especially through online means. These tools are an increase in online campaigns that are mostly carried out through social media. For this reason, this paper will explain the relationship between political activity in the cyber politics era and the political participation of the people. The research method is qualitative and the data gathering technic is conducted through literature studies.

Abstrak Dalam perkembangan dunia masa kini banyak bermunculan teknologi-teknologi yang dapat mempermudah hidup manusia, salah satunya adalah internet yang berada dalam ranah siber. Perkembangan teknologi dalam internet saat ini memungkinkan aktivitas-aktivitas politik dijalankan melalui ranah tersebut. Perkembangan dalam bentuk kemudahan-kemudahan untuk mengakses informasi-informasi yang berkaitan aktivitas-aktivitas politik saat ini banyak dilakukan melalui medium siber tersebut, sehingga disebut dengan politik siber. Politik siber sangat mengandalkan platform digital untuk mendiseminasikan pesan-pesan politik. Dengan demikian, di tengah kecanggihannya arus teknologi informasi saat ini, diharapkan era politik siber dapat berpengaruh positif terhadap partisipasi politik masyarakat. Partisipasi politik masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan pemimpin-pemimpin politik karena peran mereka sangat tinggi di dalam era politik siber. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Untuk itu, tulisan ini akan menjelaskan keterkaitan antara aktivitas politik di era politik siber dengan partisipasi politik masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur.

Tentang:

Jerry Indrawan, menyelesaikan studi S2 di Universitas Pertahanan pada tahun 2014. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Astin Julia Rosa, merupakan mahasiswa di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Anwar Ilmar, menyelesaikan studi S2 Jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Garcia Krisnando Nathanael, menyelesaikan studi S2 Jurusan Ilmu Komunikasi di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi London School of Public Relations pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

PENDAHULUAN

Kajian ilmu politik memiliki artian sebagai sebuah bentuk ilmu yang mempelajari politik dan kepolitikan yang mengatur kehidupan kolektif dengan baik mengingat kehidupan masyarakat pada masa sebelumnya (Budiardjo, 2008). Ilmu politik pada dasarnya mempelajari keterkaitan antara yang akan dipilih dan juga yang memilih atau dikenal dengan sebutan pemilihan umum yang mana hak pilih warga negara digunakan dengan semestinya.

Indonesia merupakan sebuah negara dengan jumlah penduduk yang banyak jika dibandingkan dengan mayoritas negara-negara lain di dunia. Sebelum memasuki kalimat yang lebih mendalam, bentuk Negara Indonesia yaitu Republik sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik”. Dikatakan oleh Ni'matul Huda “Negara kesatuan dideklarasikan oleh para pendirinya saat kemerdekaan dengan mengklaim seluruh wilayahnya sebagai bagian dari suatu negara, negara tidak dibentuk berdasarkan kesepakatan, setelah itu baru dibentuk wilayah atau daerah di bawahnya (Huda, 2004).

Kesatuan berarti setiap warga yang ada di dalamnya merasakan bentuk kenyamanan dan kedamaian, akan tetapi hingga saat ini Indonesia memiliki banyak permasalahan, seperti misalnya Indonesia memiliki 34 Provinsi di negara ini yang secara tidak langsung memiliki beragam permasalahan mulai dari masalah keuangan, kebudayaan, bahkan hingga mencapai permasalahan terkait pada saat adanya pesta demokrasi baik dalam bentuk pemilihan presiden dan wakilnya hingga pemilihan terkait kepala daerah, seperti gubernur dan bupati.

Menurut penjelasan yang disampaikan Flew dalam Situmorang, “*the idea of new media captures both the development of unique forms of digital media and the remaking of more traditional media forms to adopt and adapt to the new media technologies*”. Yang mana penjelasannya berarti istilah media baru telah disepakati sebagai sebuah perbedaan antara media lama dengan media saat ini yaitu media terbaru (Situmorang, 2012).

Semakin pesatnya sebuah perkembangan zaman juga tidak terlepas dari keadaan perpolitikan yang sering kali membutuhkan adanya saran dan juga kritik yang disampaikan dari rakyat sebagai bentuk evaluasi kepada partai politik dan politisi yang akan mencalonkan dirinya. Para pelaku politik harus bisa menyampaikan pesan atau visi dan misi serta program kerja mereka kepada para pendukungnya melalui sarana media sosial yang dapat membangun berbagai opini dari masyarakat pemilih, yang kemudian opini ini yang dimanfaatkan partai politik dan politisi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (Wahyudi, 2018).

Pemilu merupakan sebuah instrumen yang mentransformasikan kedaulatan menjadi kewenangan. Melalui pemilu, prinsip kedaulatan di tangan rakyat akan diuji melalui sebuah kontestasi politik. Warga negara yang memiliki kedaulatan, melalui pemilu akan memilih wakil atau orang yang akan duduk di badan eksekutif atau legislatif. Wakil-wakil ini akan memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan publik yang terkait dengan kepentingan seluruh warga negara.

Dalam setiap pemilu yang dilaksanakan di era reformasi, mulai dari tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan terakhir 2019, partisipasi politik tidak selalu maksimal, alias masih ada yang tidak menggunakan hak suaranya. Kondisi ini terjadi di dalam pemilu legislatif (pileg), maupun pemilu presiden (pilpres) Oleh karena itu, dari setiap pemilihan yang diadakan di Indonesia memiliki permasalahan dalam hal jumlah pemilih yang mulai berpartisipasi secara aktif untuk mengikuti pemilihan suara. Partisipasi sendiri digunakan oleh orang-orang sebagai bentuk kegiatan yang ikut aktif dan serta dalam pemilihan yang dilangsungkan oleh negaranya baik memilih secara langsung dan juga tidak langsung (Budiardjo, 2008).

Selanjutnya, perkembangan dunia siber sudah sangat marak dewasa ini. Hal ini diawali dengan adanya internet yang merupakan suatu inovasi teknologi yang menyebabkan manusia lebih mudah untuk berinteraksi dalam arus komunikasi dan informasi dengan akses

yang lebih cepat, daya jangkauan luas, dan menggunakan biaya terjangkau. Penggunaan internet dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat dibendung selaras dengan perkembangan zaman. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh masyarakat menyebabkan terciptanya ruang baru untuk saling berinteraksi yang disebut dengan *cyberspace* (ruang siber). Interaksi yang terjadi di ruang siber oleh suatu kelompok masyarakat, baik di lingkungan terkecil hingga antar-negara dan antar-benua dapat terjadi dalam berbagai hal dalam kehidupan bermasyarakat, meskipun harus tetap memperhatikan faktor keamanannya.

Dengan demikian, politik siber merupakan suatu perspektif baru untuk melihat, memahami, dan menganalisis aktivitas-aktivitas politik, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri dalam perkembangan teknologi komunikasi dan informasi di dalam ruang siber. Itu sebabnya tulisan ini akan membahas kaitan antara penggunaan ruang siber untuk kepentingan aktivitas-aktivitas politik, khususnya partisipasi politik masyarakat.

Pentingnya membahas tema ini adalah karena kehidupan politik dunia, khususnya pasca pandemi Covid-19 sudah tidak sama lagi. Aktivitas-aktivitas politik yang dulu dilakukan secara fisik sekarang mulai beralih ke dunia maya. Kondisi ini menjadi sebuah masalah penting yang harus diteliti karena memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap eksistensi dari politik itu sendiri. Itu sebabnya penelitian ini bertujuan untuk meneliti partisipasi politik masyarakat di era siber. Dengan demikian, rumusan masalah dari penelitian ini adalah: “Apakah partisipasi masyarakat di era politik siber mengalami peningkatan atau tidak?”.

METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian dibahas metode yang merupakan pendekatan praktis dalam setiap penelitian ilmiah. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi setiap peneliti mengetahui suatu peristiwa atau keadaan yang diinginkan. Untuk menerapkan teori terhadap permasalahan, diperlukan metode khusus yang dianggap relevan dan dapat membantu memecahkan permasalahan. Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Metode deskriptif dipilih untuk menjelaskan masalah pada penelitian ini karena metode ini adalah sebuah metode penelitian yang membuat gambaran mengenai kejadian untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti (Moelong, 2001).

Desain penelitian yang bersifat deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (individu, komunitas, lembaga masyarakat dll) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Nawawi, 1997). Fakta-fakta yang didapatkan di lapangan diharapkan dapat memberi gambaran tentang bagaimana korupsi dilakukan dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Penulis melakukan proses studi pustaka dengan mengunjungi berbagai perpustakaan (*library research*) dan mengumpulkan data-data primer melalui bahan-bahan tulisan dalam berbagai bentuk, yang diharapkan dapat memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini.

LANDASAN TEORITIK

Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teori Politik Siber atau lebih dikenal dengan teori *Cyberpolitics*. Teori *Cyberpolitics* menurut Nazli Choucri adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di

seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti “politik”. Kompleksitas yang muncul terkait awalan “cyber” itulah yang membedakan semantik yang baru dibangun ini (Choucri, 2021).

Atas dasar itulah, seperti yang dikatakan Choucri, ada semantik baru yang dibangun dalam terminologi politik. Semantik tersebut adalah *Cyberpolitics*, di mana kegiatan-kegiatan politik yang memiliki signifikansi besar terhadap jalannya sebuah negara, pemerintahan, termasuk roda kehidupan masyarakat, dilakukan melalui ruang siber. *Cyberpolitics* berkembang menjadi sebuah istilah yang bisa dipakai untuk menjelaskan aktivitas-aktivitas politik modern, yang tidak perlu lagi menggunakan ruang nyata, melainkan cukup ruang siber yang memiliki pengandai-andaian dan realitanya sendiri (Choucri, 2012). Ini sebabnya untuk melihat peningkatan partisipasi masyarakat di era politik siber ini, penulis menggunakan teori *Cyberpolitics*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengenal Politik Siber

Politik siber berkaitan secara langsung dengan ruang siber. Dalam ruang siber terdapat sebuah bentuk-bentuk yang dapat menjelaskan seperti apa ruang siber itu. Timbulnya sebuah isu-isu menjadikannya dalam bentuk terminologi yang menunjukkan latar belakang proses pengambilan keputusan oleh pemerintahan negara. Politik siber berhubungan erat dengan bentuk kegiatan-kegiatan politik, seperti partisipasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, komunikasi politik, kampanye politik, keamanan dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat (Aji & Indrawan, 2019).

Politik siber dengan demikian sangat terkait dengan media digital. Menurut Hasfi dijelaskan bahwa media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elite dan warga negara atau non-elite. Ruang siber merupakan sebuah bentuk sinyal atas terjadinya kemajuan modernitas dalam konteks post-modernis (Hasfi, 2019).

Ada banyak sekali bentuk media, khususnya media sosial, di dalam perkembangan teknologi dan informasi. Beberapa contoh yang paling terkenal, seperti, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Media sosial memberi kemudahan untuk membagikan data sebagai bentuk diseminasi informasi kepada khalayak luas. Kehadiran media sosial juga membuat para penggunanya lebih mengerti keadaan di negaranya, maupun di luar negaranya. Dengan adanya media sosial ini, masyarakat mudah untuk mencari informasi di ranah daring tentang politik. Begitu pula para politisi untuk melakukan kegiatan dan aktivitas politiknya secara daring. Kemajuan teknologi, khususnya penggunaan media sosial akhirnya mempermudah umat manusia untuk mengakses informasi apa pun yang tersedia secara daring, dalam hal ini khususnya informasi-informasi tentang politik.

Jadi, menurut penulis kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang siber. Kondisi demikian merupakan bagian dari transformasi masyarakat untuk menjadi lebih kreatif dan kritis, namun tetap bertanggung jawab atas konten-konten yang disampaikan dalam ruang siber, yang sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

Perkembangan Teknologi Informasi

Dalam media digital yang mana terdapat sebuah bentuk hasil dari teknologi tersebut yang bernama internet, yaitu sebuah gudang informasi tanpa batas, sebagai kumpula data (*database*) atau perpustakaan multimedia yang sangat besar dan lengkap dalam bentuk maya (Efriza & Indrawan, 2018). Dengan internet juga setiap kegiatan dapat dipermudah dan memiliki pengaruh yang penting dalam kemajuan bidang teknologi dan informasi yang dimiliki di negara tersebut.

Bentuk media komunikasi dan teknologi pada era ini memunculkan jenis-jenis yang berbeda beda. Salah satu contohnya adalah *e-commerce*, yang berarti adanya kemudahan teknologi dalam bidang perdagangan atau dikenal juga dengan *online shop*. Tujuannya untuk memudahkan penggunaannya untuk memilih jenis barang tanpa langsung bertatap muka dengan penjualnya (Mardatila, 2020).

Selain dalam bentuk perdagangan daring, bentuk kemajuan teknologi dan informasi juga mempengaruhi adanya kemudahan dalam pemerintahan seperti terciptanya *e-government* yang berguna untuk memudahkan pemerintah daerah maupun pusat untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga lebih efisien dan juga efektif sebab dapat membuat pelayanan kepada masyarakat lebih demokratis dan *e-government* ini dapat diaplikasikan kepada lembaga legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif (Aji & Indrawan, 2019).

Perkembangan teknologi informasi yang terkait bidang politik masih terkesan asing sebab jarang sekali masyarakat yang mengetahui bentuk teknologi terkait politik yang dikenal dengan istilah politik siber yang memiliki fakta bahwa peran ruang siber dalam dunia politik juga memiliki arti yang sama penting dengan kemajuab teknologi di bidang yang lainnya. Fakta adanya kemajuan teknologi dengan perkembangan yang dialami oleh dunia perpolitikan tak terlepas dari adanya komunikasi politik yang membutuhkan aktor-aktor politik dalam menjalankan perannya masing-masing (Indrawan, 2019).

Menurut Efriza dan Indrawan, dalam hal ini yang termasuk dalam aktor politik seperti, politisi, figur politik, birokrat, aktivis kelompok kepentingan, kelompok penekan dan juga jurnalis dari media massa sebagai sebuah hal yang penting. Begitu juga dengan internet, di mana berbagai macam hal, pengetahuan, bentuk, seni dan yang lainnya dapat mudah diakses dan dipelajari oleh bangsa yang lainnya. Akan tetapi internet ini juga memiliki hal yang negatif dibalik segala sesuatu kemudahan yang diberikan, di dalam internet ada banyak sekali bentuk sifat dan pribadi setiap orang, mulai dari adanya sosialisasi gagasan, sebuah tuntutan, ajakan, hingga protes yang dilaksanakan secara orasi (Efriza & Indrawan, 2018).

Partisipasi Politik Era Politik Siber

Belakangan ini istilah siber semakin sering terdengar oleh telinga kita sebagai sebuah bentuk pengamanan, pengawasan dan juga pelayanan dalam era digital saat ini. Mulai dari *e-government* hingga bentuk politik siber yang digunakan sebagai bentuk atas pelayanan dan informasi terkait perpolitikan di daerah tersebut. Menurut tulisan yang disampaikan oleh Nazli Choucri, yang dikutip dari Indrawan, menurutnya politik siber adalah sebuah terminologi yang diciptakan, berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandai-andaian dan realitanya sendiri (Indrawan, 2019).

Setelah mengetahui dengan adanya internet bisa membuka wawasan masyarakat untuk lebih bisa berpikir secara rasional terkait isu-isu pemberitaan pada pemerintahan dan politik. Banyaknya sudut pandang yang dihasilkan oleh internet kepada pembacanya bisa menimbulkan adanya suatu permasalahan. Permasalahan ini sering kali dikaitkan dengan rasa tidak setuju dengan opini yang disampaikan oleh sudut pandang yang lainnya di sebuah

wilayah dalam bernegara, dari setiap opini yang dibuat dapat menghasilkan sebuah pemikiran terbaru terkait makna dari permasalahan tersebut.

Perkembangan teknologi dan informasi di era saat ini tidak lagi hanya lah menggunakan media seperti, media cetak dan lainnya, namun saat ini sudah beragam bentuk dari perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang dikenal juga dengan media digital. Kemajuan yang dihasilkan oleh teknologi itu sendiri berimbas juga kepada faktor pemerintahan dan juga politik di suatu negara. Sebelum mengalami perkembangan yang begitu drastis, pada dasarnya konsep dari teknologi sendiri sudah muncul sejak era 1960-an, yang semakin lama terjadilah sebuah eksperimen internet pada saat itu, yang menghasilkan perkembangan yang pesat saat ini (Herdyanto, 2019).

Penggunaan internet menjadi salah satu poin penting dalam teknologi, dengan tingkat pemakaian internet di setiap daerah dalam negara Indonesia mengalami peningkatan yang dratis tingginya. Menurut data yang disampaikan oleh sekretaris Jenderal APJII Henri Kasyfi Soemartono, yang dikutip dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengungkapkan bahwa penggunaan internet naik dari 64,8% tahun 2018 menjadi 73,7% tahun 2019 (Kominfo, 2020).



Gambar 1 Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2021

Dijelaskan pada bentuk infografik diatas bahwa dengan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia hampir dalam hitungan sekitar 272,1 Juta penduduk yang mendiami daerah Indonesia, dari jumlah penduduk yang berada di Indonesia memungkinkan adanya tingkat peningkatan grafik terkait penggunaan internet yang tinggi juga yaitu berkisar 175,3 Juta penduduk yang terdapat di Indonesia pada saat itu. Dengan jumlah penetrasinya sekitar 64% ini juga memungkinkan adanya tingkat penggunaan sosial media yang berkisar hingga 160

Juta dengan jumlah telepon pintar yang telah terdaftar dan mendapatkan koneksi oleh internet sekitar 338,2 Juta (Saputra, 2020).

Internet di Indonesia jelas telah meningkat yang dapat juga berpengaruh baik secara positif dan juga negatif kepada pemerintahan politik di Indonesia. Dalam kegiatan perpolitikan tidak lah terlepas dari sebuah kegiatan yang dinantikan oleh warga negara sebagai ajang bentuk dipilih dan memilih setiap lima tahunnya, kegiatan tersebut dikenal juga dengan pesta demokrasi atau Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Rahmatunnisa (2017) terdapat fenomena yang dimiliki oleh pemilihan umum yang mana semakin menjadi sebuah fenomena global, yaitu pemilu masih menjadi bahan topik pembicaraan di dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini membuat isu-isu kepemiluan selalu menjadi *trending topic* dunia, dimana pun pemilu diadakan, apalagi di negara dengan ratusan juta penduduk seperti kita. Baik di dalam negara maju maupun berkembang, pemilu menjadi sarana terbaik untuk memfasilitasi pergantian kekuasaan yang damai. Dalam pemilu yang akan dilaksanakan sudah pasti memerlukan sebuah partisipasi dan peran aktif dari masyarakat.

Berikutnya, peran masyarakat dalam politik siber menjadi penting karena penulis berpendapat, pendidikan politik siber adalah kunci menjaga demokrasi bersih dari segala hal-hal yang negatif dan hoaks. Ranah yang berwarna abu-abu ini harus dipenuhi oleh netizen yang cerdas sehingga jika muncul konten negatif atau hoaks, kontra-isunya langsung muncul untuk menanggapi konten-konten tersebut. Pemerintah di negara-negara demokratis harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara untuk membangun daya tahan dan penangkal (Aji & Indrawan, 2019).

Membangun sebuah komunitas masyarakat yang sehat digital, yang dapat dengan cepat merespons ancaman terhadap demokrasi siber yang muncul, adalah hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tidak seperti negara-negara otoriter yang mengandalkan pada solusi *top-down*, demokrasi memiliki keunggulan untuk melahirkan solusi langsung dari akar rumput untuk menangani masalah yang ada dalam politik siber. Solusi tidak harus datang dari pusat atau diarahkan dari sebuah regulasi yang kuat atau memaksa. Masyarakat, atau katakanlah *civil society*, dapat memanfaatkan pendidikan politik siber untuk membangun sebuah kontranarasi yang positif, termasuk memberikan penyadaran-penyadaran digital kepada masyarakat agar memahami politik siber, dengan demikian juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ranah tersebut (Aji & Indrawan, 2019).

Politik digital dalam kaitannya dengan peningkatan jumlah partisipasi juga disebabkan makin maraknya bentuk media sosial. Dalam partai politik juga telah memiliki beberapa bentuk media sosial seperti akun *facebook*, *Twitter* dan *YouTube*. Sekalipun penggunaannya memang belum merata seluruh partai politik, tetapi paling tidak semua partai politik di Indonesia saat ini sudah memiliki akun media sosial (Anshari, 2013).

Hal ini sesuai dengan teori *Cyberpolitics*, karena berkaitan dengan interaksi manusia (politik) yang meliputi kegiatan-kegiatan, seperti siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana, yang dimungkinkan untuk terjadi melalui ranah ruang siber sebagai sebuah arena baru pertarungan dengan pengandaian dan realitanya sendiri. Meskipun ada perbedaan dalam perspektif di seluruh dunia, namun tetap terdapat pemahaman ilmiah umum tentang arti "politik". Kompleksitas yang muncul terkait awalan "*cyber*" itulah yang membedakan semantik yang baru dibangun ini. Artinya, penggunaan media sosial untuk kepentingan politik sesuai dengan realita baru kegiatan-kegiatan politik yang terjadi di ranah siber.

Kemudian, masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga (*watchdog*), yang mengawasi media sosial, termasuk hoaks atau kampanye hitam yang muncul. Kedua, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarkan

konten yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua *stakeholder* di bidang politik siber untuk menciptakan kondisi yang kondusif, serta memperbaiki ranah siber dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam. Mencari satu suara yang sama terkait iklim demokrasi siber yang sehat juga dilakukan agar ancaman otoritarianisme tidak lagi muncul di era demokrasi siber yang berkembang sangat masif ini (Schafer, 2018).

Peran masyarakat dalam politik siber pun saat ini makin gencar dilakukan. Dalam hal ini, penulis ingin khusus mengamati kalangan masyarakat dari generasi milenial (usia di bawah 29 tahun). Sekalipun harus diakui generasi milenial saat ini masih sedikit sekali yang tertarik isu-isu politik. Sebuah fakta yang dipotret dari penelitian CSIS, bahwa hanya 2.3% generasi milenial yang tertarik untuk membahas isu-isu politik. Olahraga dan musik menjadi dua hal yang paling menarik perhatian generasi milenial. Namun, di penelitian yang sama, lebih dari 80% generasi milenial percaya bahwa pemerintah akan mampu membawa kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan. Bahkan, tingkat optimisme mereka terhadap masa depan mencapai 94.8% (Aji & Indrawan, 2019).

Sebuah fakta yang miris sebenarnya, akan tetapi dari sisi penulis, justru membangkitkan tantangan tersendiri bagi aktivitas politik dalam ruang siber, mengapa? Karena di penelitian yang sama, CSIS juga menanyakan penetrasi generasi milenial terhadap sumber informasi, di mana 54.3% milenial mendapat informasi dari media daring. Kemudian, tingkat pemilikan akun media sosial pun tinggi, mencapai di atas 80% (Facebook yang tertinggi).

Apa artinya, penulis melihat bahwa ini adalah kesempatan besar untuk mengenalkan politik kepada generasi milenial. Mereka sangat rutin untuk mengakses dunia maya setiap harinya. Hanya saja mereka belum tertarik untuk “meng-klik” berita-berita politik. Kesadaran mereka berpolitik harus ditingkatkan dengan memperbanyak ekspose mereka terhadap konten-konten politik di ruang siber, karena sebenarnya, banyak generasi milenial yang tertarik dunia politik, hanya mereka “*kudate*”, alias kurang *update*, terkait hal tersebut.

Selanjutnya, dalam sebuah pemilihan umum ada sebuah bentuk perayaan yang mana sebagai ajang kontestasi dan juga dapat digunakan sebagai ajang penyampaian visi dan misi dari setiap calon yang akan dipilih. Aktivitas tersebut sering kali terdengar dengan sebutan kampanye politik, yang digunakan sebagai sebuah bentuk promosi kandidat pada saat ada acara pemilihan umum. Kampanye ini menurut penulis saat ini sudah banyak menggunakan media digital.

Kampanye merupakan sebuah bentuk atas persiapan untuk melakukan sebuah pertandingan politik dimana para kandidat berlomba-lomba untuk menarik perhatian masyarakat untuk memilih dirinya atau partai politiknya. Hal seperti ini terjadi karena semakin banyak suara yang didapatkan maka pemenang akan mendapatkan sebuah kewenangan dan juga kewajiban untuk menduduki kursi kekuasaan dalam bentuk sebuah pemerintahan (Fatimah, 2018).

Kemudian, kampanye menurut Sayuti (2014), adalah sebuah bentuk usaha terorganisasi yang berusaha untuk mempengaruhi sebuah proses-proses pembuatan keputusan di dalam kelompok spesifik. Kampanye juga merupakan salah satu bentuk yang digunakan untuk berkomunikasi politik yang disampaikan oleh aktor kepada pendengar.

Bentuk-bentuk kampanye saat ini memiliki dua bentuk, yaitu secara dalam jaringan dan luar jaringan seperti kegiatan tatap muka antara calon kandidat dengan masyarakat sebagai pemilih dalam kegiatan demokrasi. Kampanye Politik biasanya dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dan rapat-rapat umum yang berisi berbagai pidato, pembicaraan, penyampaian slogan-slogan atau dalam bentuk penyebaran barang-barang cetakan, rekaman

yang berisi sebuah bentuk ajakan, bujukan, gambar dan juga bisa berupa simbol-simbol khusus dalam kelompok politik tersebut (Efriza & Indrawan, 2018).

Selain dilaksanakan secara tatap muka, kampanye juga bisa dijalankan dalam bentuk daring (dalam jaringan). Menurut tulisan yang dikemukakan oleh Efriza dan Indrawan (2018), menjelaskan terkait bentuk kampanye yang dilaksanakan secara daring, sebab semakin tingginya perkembangan teknologi dan informasi membuat semuanya dapat terasa lebih mudah dan lebih efisien. Bentuk kampanye di era politik digital dapat dilaksanakan menggunakan media internet. Bentuk kampanyenya dapat berupa sebuah ajakan yang disampaikan di dalam blog atau tulisan elektronik, lalu bisa juga menggunakan situs seperti situs resmi dari partai politik dan lainnya, selain itu juga kampanye secara daring juga dapat memanfaatkan kecanggihan dari media sosial, seperti media *facebook*, *twitter*, *Instagram*. Bentuk pengemasan informasi secara daring juga dapat tertata dengan rapih sebab kemajuan teknologi dan kecepatan akses sebuah informasi seperti halnya bentuk informasi ajakan untuk mendukung organisasi atau individu tertentu sesuai dengan pilhan yang didapatkan dengan hati nurani tiap individu.

Keuntungan yang diperoleh dari adanya kampanye daring yaitu, melakukan kampanye daring dapat menghemat pengeluaran dana yang biasanya dibutuhkan untuk kampanye tatap muka yang membutuhkan dana lebih besar, namun dengan melaksanakan kampanye daring para kandidat dapat menghemat pendanaan yang digunakan pada saat pelaksanaan kampanye tatap muka (Farisa, 2020). Dengan kampanye daring juga tidak adanya keterbatasan dalam hal jumlah yang akan ikut dalam pelaksanaan kampanye partai politik dan individu perorangan, sebab internet dapat membuat ruangan komunikasi politik menjadi lebih luas. Jika menggunakan metode kampanye daring, masyarakat bisa mengikuti kegiatan kampanye tersebut tanpa harus kepanasan dan menimbulkan kerumunan yang begitu besar, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini. Tentunya hal ini dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat di era politik siber dewasa ini.

Kekurangan kampanye daring terjadi apabila masih ada daerah pemilihan yang masih sulit terkoneksi dalam jaringan internet. Kondisi demikian merupakan poin penting sebab internet adalah hal yang penting dalam kegiatan kampanye yang dilaksanakan secara daring. Penyelenggaraan suatu pemilihan umum dapat terlaksana dengan baik dan sukses jika layanan internet berfungsi memadai dan dapat diakses di seluruh tempat pemilihan.

Peningkatan partisipasi politik diartikan bahwa negara harus memiliki bentuk pemerintahan yang bersifat demokratis yang mana harus bekerja berdasarkan parameter kebebasan berbicara (Aji & Indrawan, 2019). Peran masyarakat dalam demokrasi yang saat ini bersifat siber juga penting, sebab kalangan masyarakat saat ini ada sebuah generasi yang dikenal dengan generasi milenial yang mana ketertarikannya pada isu-isu politik masih terbilang rendah dan yang berminat hanya sekitar 2.3%. Akan tetapi bentuk partisipasi politik terhadap pemerintah yang dianggap dapat membawa kesejahteraan percaya hingga kisaran 80% dengan optimisme 94.8% terhadap masa depan (Aji & Indrawan, 2019).

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses media sosial yang luas dan mudah membuat kampanye jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan erat dengan teori *Cyberpolitics* yang mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.

Terakhir, sebagai penutup, politik siber memang bukan wacana baru dalam diskusi publik. Kebaruan (*novelty*) dalam diskusi tersebut adalah pembahasan tentang peluang dan risikonya bagi peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia. Dalam arti luas, kontribusi politik siber berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan

multikultural, sehingga meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dalam arti khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, antara warga negara dan perwakilan politiknya, atau antara kelompok kepentingan dan komunitas pembuat kebijakan di tingkat pemerintahan.

SIMPULAN

Perkembangan dunia siber sudah sangat marak dewasa ini. Hal ini diawali dengan adanya internet yang merupakan suatu inovasi teknologi yang menyebabkan manusia lebih mudah untuk berinteraksi dalam arus komunikasi dan informasi dengan akses yang lebih cepat dan memiliki daya jangkauan luas. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi oleh masyarakat menyebabkan terciptanya ruang baru untuk saling berinteraksi yang disebut dengan *cyberspace* (ruang siber).

Politik siber berhubungan erat dengan bentuk kegiatan-kegiatan politik, seperti partisipasi politik, pendidikan politik, kampanye politik, implementasi demokrasi, komunikasi politik, kampanye politik, keamanan dan pertahanan sebuah negara. Selain itu, politik siber berkaitan juga dengan sosial, budaya, dan juga masyarakat. Kajian politik siber sangat diperlukan dalam perkembangannya di mana aktivitas politik masyarakat sudah mulai beralih dari yang sifatnya konvensional bergeser dengan memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang ada dalam ruang siber. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan demokrasi dan partisipasi politik masyarakat yang diharapkan semakin meningkat.

Masyarakat dapat memainkan empat peranan penting dalam politik siber. Pertama, mereka dapat memainkan peran sebagai anjing penjaga (*watchdog*), yang mengawasi media sosial, termasuk hoaks atau kampanye hitam yang muncul. Kedua, masyarakat dapat membantu memberikan informasi kepada warganet melalui program-program literasi media. Ketiga, masyarakat dapat menekan perusahaan, bisnis, atau platform media sosial, yang sadar atau tidak, bertanggung jawab menampilkan atau menyebarkan konten yang menyesatkan. Keempat, masyarakat dapat bekerja sama dengan semua *stakeholder* di bidang politik siber untuk menciptakan kondisi yang kondusif, serta memperbaiki ranah siber dari kondisi-kondisi ketidakpercayaan, polarisasi, sampai penyebaran hoaks dan kampanye hitam.

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di era siber mengalami peningkatan, khususnya melalui sarana-sarana daring. Sarana-sarana tersebut, adalah peningkatan kampanye daring yang banyak dilakukan melalui media sosial. Akses media sosial yang luas dan mudah membuat kampanye jenis ini menjadi salah satu penyebab meningkatnya partisipasi politik masyarakat di era politik siber. Temuan penulis ini berhubungan erat dengan teori *Cyberpolitics* yang mensyaratkan adanya aktivitas-aktivitas politik yang dilakukan melalui ranah siber.

Politik siber memang bukan wacana baru dalam diskusi publik. Kontribusi politik siber berupa peningkatan kesadaran politik warga negara, penguatan otonomi diri dalam pengambilan keputusan politik, dan pematangan etika sosial untuk kehidupan multikultural, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam arti khusus, politik siber meningkatkan interaksi antara masyarakat dan negara, sehingga berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat secara umum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada UPN Veteran Jakarta atas insentif publikasi karya ilmiah melalui Surat Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor 518/UN61.0/HK.2/2021 tentang Ketentuan dan Mekanisme untuk Mendapatkan Insentif bagi Dosen di Lingkungan UPN Veteran Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, P. M., & Indrawan, J. (2019). *Cyberpolitics: Perspektif Baru Memahami Politik Era Siber*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Anshari, A. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi* 8(1), 91-101.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama.
- Choucri, N. (2012). *Cyberpolitics in International Relations*. Cambridge: MIT Press.
- Efriza., & Indrawan, J. (2018). *Komunikasi Politik Pemahaman secara Teoretis dan Empiris*. Malang: Intrans Publishing.
- Farisa, F. C. (2020, Juni 19). Menurut Bawaslu Ini Kelebihan Dan Kekurangan Kampanye Daring. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/19/17352881/menurut-bawaslu-ini-kelebihan-dan-kekurangan-kampanye-daring?page=all> (23 Januari 2021).
- Fatimah, S. (2018). *Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5-16. <https://doi.org/10.2489/resolusi.v1i1.154>
- Hasfi, N. (2019). Komunikasi Politik di Era Digital. *Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 93-111. <https://doi.org/10.14710/politika.10.1.2019.93-111>
- Herdyanto, A. (2019, Juli 31). Ini 6 Fakta Sejarah Awal Mula Internet di Dunia, Nyawanya Era Digital. *idntimes.com*. <https://www.idntimes.com/tech/trend/abraham-herdyanto/sejarah-awal-mula-internet/1> (21 Januari 2021).
- Huda, N. 2004. *Sejarah Ketatanegaraan Indonesia, Pilihan atas Federalisme atau Negara Kesatuan*. Yogyakarta: UII Press.
- Indrawan, J. (2019). Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber. *Jurnal Politica*, 10(1), 1-15. [10.22212/jp.v10i1.1315](https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1315)
- Kominfo. (2020). *Dirjen PPI: Survei Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Bagian Penting dari Transformasi Digital*. Online. https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker 23 Januari 2021.
- Mardatila, A. (2020, September 18). *E-Commerce adalah Pembelian dan Penjualan secara Elektronik, Berikut Selengkapannya*. *merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/sumut/e-commerce-adalah-pembelian-dan-penjualan-secara-elektronik-berikut-selengkapannya-kln.html> (21 Januari 2021).
- Moelong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nawawi, H. (1997). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Rahmatunnisa, M. (2017). Mengapa Integritas Pemilu Penting. *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1-11. <http://skpp.jatim.bawaslu.go.id/images/cart/RI/JURNAL/JURNAL%20MENGAPA%20INTEGRITAS%20ITU%20PENTING.pdf>
- Saputra, B. (2020, September). *Infografis Pengguna Internet Indonesia 2020*. validnews.com. <https://www.validnews.id/Infografis-Pengguna-Internet-Indonesia-2020-4k> (21 Januari 2021).
- Sayuti, S. D. 2014. *Komunikasi Pemasaran Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schafer, B. (2018). *A Democratic Response to Digital Disinformation: The Role of Civil Society*, dalam AICGS Policy Report: Moving Beyond Cyber Wars: A Transatlantic Dialogue. Washington: American Institute for Contemporary German Studies John Hopkins University & Hanns Seidel Stiftung.
- Situmorang, R, J. (2012). Pemanfaatan Internet Sebagai New Media dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 73-87. <https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418.%25p>
- Wahyudi, V. (2018). Politik Digital Di Era Revolusi Industri 4.0 Marketing & Komunikasi Politik. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(2), 149-168. <https://doi.org/10.20414/politea.v1i2.819>